



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa 21 Januari 2025



Ketua H. Abdillah Nashih Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, S.H. Wakil Ketua Warih Andono, SE

RINGKASAN BERITA HARI INI

PMK Naik Drastis, Ternak Mati hingga Dipotong Paksa

KOTA- Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak di Sidoarjo dengan jumlah kasus yang meningkat drastis pada Januari ini. Hingga saat ini, tercatat 1.315 kasus PMK di hewan ternak di Kota Delta, dengan rincian 109 ekor ternak sakit, sembilan ekor mati, dan 17 ekor dipotong paksa.

"Menjelang persiapan kurban, banyak ternak dari luar daerah yang masuk ke Sidoarjo tanpa pengawasan yang ketat," ujarnya, Senin (20/1). Untuk menekan penyebaran penyakit, Pemkab Sidoarjo kini mewajibkan setiap ternak yang keluar maupun masuk ke daerah tersebut untuk memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Hewan yang terindikasi sakit dipastikan tidak diperbolehkan masuk ke Sidoarjo.

Ke Halaman 10



KASUS NAIK: Petugas saat memvaksin ternak di Sidoarjo.

Tinggai menjalankan siapa apa yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025, ujar Gus Wawan, sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan.

Kedua, Pemkab Sidoarjo kalah di pengadilan. PT ISS KSO menang dan punya hak untuk menjalankan terus kerja sama dengan Dishub Sidoarjo. Jika pemerintah kalah, keputusan dalam APBD 2025 tentang target PAD dari parkir tidak perlu dilaksanakan.

Yang tidak boleh adalah Pemkab Sidoarjo menang di pengadilan, tetapi belum ada target apa pun dalam APBD. Dishub Sidoarjo tidak bisa bergerak karena belum siap alternatif apa-apa.

"Alibi,na, potensi pendapatan akan luh (hilang) sangat tinggi" tegas Gus Wawan.

Baca Juga:

Dishub Sidoarjo Ditarget Rp 25 Miliar, Sengketa Parkir vs PT ISS Belum Klar



Kepala Dishub Sidoarjo Benny Aritonga saat keluar dari Ruang Sidang Tiga Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (14 Januari 2025). Sidang gagal (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sebelumnya diberitakan, DPRD Sidoarjo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo menetapkan target berat. Di tengah sengketa pengalangan parkir dengan PT ISS-KSO, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo ditarget harus menaruh PAD Rp 25 miliar dari sektor parkir. Sudut tidak dalam APBD 2025.

Sengketa antara PT Indonesia Sarana Servis- Kerja Sama Operasional (PT ISS-KSO) masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Mediasi empat kali berakhir tanpa hasil. Sidang pada Selasa (14 Januari 2025) lalu juga gagal. Pembacaan materi gugatan batal.

Dishub Sidoarjo hadi. PT ISS-KSO tidak hadir tanpa penjelasan. Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan akan memanggil PT ISS-KSO agar hadir pada sidang Selasa (21 Januari 2025).

"Sidang ditunda," kata Kepala Dishub Sidoarjo Benny Aritonga saat keluar dari Ruang Sidang Tiga Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (21 Januari 2025).

Saat pengesahan APBD menjadi APBD 2025 Sidoarjo November 2024 lalu, DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:

Tantangan dari Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo

Berbagai sektor digenjur. Salah satunya, pengelolaan parkir. DPRD Sidoarjo meminta Dishub Sidoarjo memencilkan alternatif. Pengelolaan parkir diharapkan bisa maksimal pada 2025 ini.

3.500 Dosis Disiapkan untuk Vaksinasi Massal

Putus Penularan Penyakit Mulut dan Kuku, Dilaksanakan Serentak Besok

SIDOARJO- Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Sidoarjo melonjak. Hingga saat ini ada 1,315 ternak yang terdampak. Petugas kesehatan setempat akan melakukan vaksinasi massal serentak untuk memutus penularan.



SUDAH DIVAKSIN: Amir Rozaq memberi pakan tambahan untuk ternak sapi yang di Pekurungan, Sukodono, Sidoarjo, kemarin (20/1).

Tony kemarin (20/1). Total sebanyak 3.500 dosis yang diberikan untuk vaksin penangan PMK di Kota Delta. Setelah habis, dia menyebut akan ada penambahan vaksin lagi dari pemerintah pusat. Proyeksinya pada bulan depan. "Karena sudah ada instruksi dari pemerintah pusat tentang darurat kewaspadaan peningkatan PMK," katanya. Karena itu, vaksinasi digenjur. Selain vaksin, pihaknya akan memberikan vitamin bagi hewan sekaligus desinfektan yang bisa digunakan di kandang ternak. Pihaknya juga memperketat lalu lintas hewan yang keluar maupun masuk ke Sidoarjo. Pengirim harus mengurus surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Sementara itu, di tengah wabah PMK yang terus naik, permintaan terhadap daging sapi masih stabil. Kepala

Bidang Perdagangan Disperdag Sidoarjo Lusyuning-sih mengatakan, sampai saat ini peredaran dan stok daging sapi di pasaran masih normal. "Tidak ada penurunan, penjualan masih normal," jelasnya kemarin. Harga juga masih stabil di kisaran Rp 110 ribu per kilogram di pasar-pasar besar di Sidoarjo. (uz/fal)

Lahan Pertanian Menyusut, Tantangan Dispaperta Menjaga Ketahanan Pangan

KOTA- Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo terus berupaya menjaga ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan yang ada. Kepala Dispaperta Sidoarjo, Eni Rustianingsih, mengatakan bahwa luas lahan pertanian di Kota Delta saat ini mencapai 19.942 hektare, dengan sebagian besar lahan digunakan untuk tanam padi dan palawija, yakni seluas 14.651 hektare.

"Kami menghadapi penguangan lahan seluas 500 hektare akibat alih fungsi lahan dan peralihan komoditas, seperti tanam tebu," ujarnya pada Senin (20/1). Tahun lalu, produksi padi Sidoarjo tercatat mencapai 189.398,5 ton, yang menghasilkan surplus beras sebesar 12.978 ton. Namun, angka tersebut masih dianggap kurang. Untuk memenuhi kebutuhan beras total sebesar 230.914 ton, Sidoarjo masih bergantung pada impor dari daerah lain.

"Perubahan penduduk yang terus meningkat menyuga mengatasi masalah ini," katanya. Sebagai bagian dari mendukung Program Cita Presiden Prabowo menyebarkan bahwa haknya telah menyalah bantuan benih dan pi berubahdi kepada kolektansi. Selain itu, distripangan juga menjadi ptiatn utama Dispaperta. "Kami berupaya menbaik sistem distribusngan. Distribusi yang di adalah kunci utama di menjaga ketahanan pangterangnya.

"Kami juga mengukub peralihan lahan dari tanapadi ke tebu menjadi satusatu tantangan bagi Dispaperta. Namun, pihaknya optimis bahwa kemadipangan di Sidoarjo dapat wujud dengan adanya kolaborasi antara semua pihak. "Dengan sinergi yang kami yakin Sidoarjo dapat menjaga ketahanan pangan untuk masa depan berkelanjutan," tutup (sa/ya)

PANGAN: Petani saat menyemprot tanaman padi. Is juga memotivasi pemanfaatn sumber daya alam yang belum optimal, yang turut memacu ketegantngan pada impor beras dari daerah lain. "Kami terus ber-

upaya mengatasi masalah ini," katanya. Sebagai bagian dari mendukung Program Cita Presiden Prabowo menyebarkan bahwa haknya telah menyalah bantuan benih dan pi berubahdi kepada kolektansi. Selain itu, distripangan juga menjadi ptiatn utama Dispaperta. "Kami berupaya menbaik sistem distribusngan. Distribusi yang di adalah kunci utama di menjaga ketahanan pangterangnya.

Ke Halaman 10

Sengketa Parkir di Sidoarjo, Komisi B DPRD Sidoarjo Sebut Dua Kemungkinan untuk Dishub Sidoarjo

Editor: Fathur Roziq

20 Januari 2025 18:50



Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan

KETIK, SIDOARJO - Komisi B (Perekonomian dan Keuangan) DPRD Sidoarjo menegakkan bahwa target pendapatan Rp 25 miliar dari pengelolaan parkir memang telah ditetapkan dalam APBD 2025. Target tersebut bisa tercapai. Bisa pula tidak. Bergantung hasil sidang sengketa perdata antara Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis (PT ISS).

Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, ada dua kemungkinan hasil sidang perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Pertama, Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini, Dishub Sidoarjo, memenangi sengketa. Itu berarti Dishub Sidoarjo wajib mencapai target maksimal dari pengelolaan parkir.

Lahan Pertanian Menyusut, Tantangan Dispaperta Menjaga Ketahanan Pangan

KOTA- Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo terus berupaya menjaga ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan yang ada. Kepala Dispaperta Sidoarjo, Eni Rustianingsih, mengatakan bahwa luas lahan pertanian di Kota Delta saat ini mencapai 19.942 hektare, dengan sebagian besar lahan digunakan untuk tanam padi dan palawija, yakni seluas 14.651 hektare.

"Kami menghadapi penguangan lahan seluas 500 hektare akibat alih fungsi lahan dan peralihan komoditas, seperti tanam tebu," ujarnya pada Senin (20/1). Tahun lalu, produksi padi Sidoarjo tercatat mencapai 189.398,5 ton, yang menghasilkan surplus beras sebesar 12.978 ton. Namun, angka tersebut masih dianggap kurang. Untuk memenuhi kebutuhan beras total sebesar 230.914 ton, Sidoarjo masih bergantung pada impor dari daerah lain.

"Perubahan penduduk yang terus meningkat menyuga mengatasi masalah ini," katanya. Sebagai bagian dari mendukung Program Cita Presiden Prabowo menyebarkan bahwa haknya telah menyalah bantuan benih dan pi berubahdi kepada kolektansi. Selain itu, distripangan juga menjadi ptiatn utama Dispaperta. "Kami berupaya menbaik sistem distribusngan. Distribusi yang di adalah kunci utama di menjaga ketahanan pangterangnya.

"Kami juga mengukub peralihan lahan dari tanapadi ke tebu menjadi satusatu tantangan bagi Dispaperta. Namun, pihaknya optimis bahwa kemadipangan di Sidoarjo dapat wujud dengan adanya kolaborasi antara semua pihak. "Dengan sinergi yang kami yakin Sidoarjo dapat menjaga ketahanan pangan untuk masa depan berkelanjutan," tutup (sa/ya)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sengketa Parkir di Sidoarjo, Komisi B DPRD Sidoarjo Sebut Dua Kemungkinan untuk Dishub Sidoarjo

Editor: Fathur Roziq

20 Januari 2025 18:50



Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Komisi B (Perekonomian dan Keuangan) DPRD Sidoarjo menegaskan bahwa target pendapatan Rp 25 miliar dari pengelolaan parkir memang telah ditetapkan dalam APBD 2025. Target tersebut bisa tercapai. Bisa pula tidak. Bergantung hasil sidang sengketa perdata antara Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis (PT ISS).

Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, ada dua kemungkinan hasil sidang perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Pertama, Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini, Dishub Sidoarjo, memenangi sengketa. Itu berarti Dishub Sidoarjo wajib mencapai target maksimal dari pengelolaan parkir.



"Tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025," ujar Gus Wawan, sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan.

Kedua, Pemkab Sidoarjo kalah di pengadilan. PT ISS KSO menang dan punya hak untuk menjalankan terus kerja sama dengan Dishub Sidoarjo. Jika pemerintah kalah, keputusan dalam APBD 2025 tentang target PAD dari parkir tidak perlu dilaksanakan.

Yang tidak boleh adalah Pemkab Sidoarjo menang di pengadilan, tetapi belum ada target

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"Akibatnya, potensi pendapatan akan lost (hilang) sangat tinggi" tegas Gus Wawan.

Baca Juga:

[Dishub Sidoarjo Ditarget Rp 25 Miliar, Sengketa Parkir vs PT ISS Belum Kelar](#)



Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga saat keluar dari Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (14 Januari 2025). Sidang gagal. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sebelumnya diberitakan, DPRD Sidoarjo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo menetapkan target berat. Di tengah sengketa pengelolaan parkir dengan PT ISS-KSO, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo ditarget harus meraup PAD Rp 25 miliar dari sektor parkir. Sudah tidak dalam APBD 2025.

Sengketa antara PT Indonesia Sarana Servis-Kerja Sama Operasional (PT ISS-KSO) masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Mediasi empat kali berakhir tanpa hasil. Sidang pada Selasa (14 Januari 2025) lalu juga gagal. Pembacaan materi gugatan batal.

Dishub Sidoarjo hadir. PT ISS-KSO tidak hadir tanpa penjelasan. Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan akan memanggil PT ISS-KSO agar hadir pada sidang Selasa (21 Januari 2025).

"Sidang ditunda," kata Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga saat keluar dari Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (21 Januari 2025).

Saat pengesahan RAPBD menjadi APBD 2025 Sidoarjo November 2024 lalu, DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:

[Tantangan dari Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo](#)

Berbagai sektor digenjot. Salah satunya, pengelolaan parkir. DPRD Sidoarjo meminta Dishub Sidoarjo mencari sistem alternatif. Pengelolaan parkir diharapkan bisa maksimal pada 2025 ini.

Pembangunan Tower Tanpa Izin Desa Simpang, Satpol PP Sidoarjo Sedang Melakukan Penyelidikan

by RadarJatim — 20 Januari 2025 in Hukum dan Kriminal

0



Yany Setyawan, Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.

22
VIEWS



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dilapangan untuk melihat langsung pembangunan tower atau menara telekomunikasi di Desa Simpang, Kecamatan Prambon.

Sebagaimana telah diberitakan oleh RadarJatim.id bahwa pembangunan menara telekomunikasi diatas Tanah Kas Desa (TKD) Simpang itu sama sekali belum mengantongi izin, baik dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (*Perkim CKTR*) maupun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*DPM PTSP*) Kabupaten Sidoarjo.

“Iya, sudah kami turunkan anggota (Satpol PP, red) untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dilapangan,” kata Yany Setyawan, Kepala Satpol PP Sidoarjo saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Senin (20/01/2025).

Diungkapkan oleh Yany bahwa pihaknya mendapatkan informasi dari media massa terkait pembangunan menara telekomunikasi setinggi sekitar 50 meter yang sempat diprotes warga diarea terdampak itu belum mengantongi izin dari dinas terkait.



Untuk itu, ia segera melakukan antisipasi dengan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi dari masyarakat, apabila nanti ada surat rekomendasi dari dinas terkait untuk dilakukan pembongkaran.

Namun, menurut Yany hingga saat ini belum ada permintaan atau surat rekomendasi dari terkait yang meminta bantuan institusinya untuk melakukan pembongkaran terhadap berdirinya menara telekomunikasi tanpa izin di Desa Simpang tersebut.

“Belum, hingga kini belum ada (surat, red) permintaan pembongkaran dari institusi terkait,” ungkapnya.

Ia tidak mau gegabah dalam melakukan tindakan tegas sebelum adanya permintaan atau koordinasi dari dinas lain terkait berdirinya menara telekomunikasi yang pembangunannya sudah hampir selesai itu.

Sementara itu, Mochammad Bachruni Aryawan, Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo belum mau berkomentar saat dimintai keterangan oleh awak media terkait langkah selanjutnya terhadap pembangunan menara telekomunikasi tanpa izin di Desa Simpang. (mams)



Radarsidoarjo

RADAR SIDOARJO | SELASA, 21 JANUARI 2025 | HALAMAN 10

Lahan Pertanian Menyusut, Tantangan Dispaperta Menjaga Ketahanan Pangan

KOTA-Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo terus berupaya menjaga ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan yang ada.

Kepala Dispaperta Sidoarjo, Eni Rustianingsih, mengatakan bahwa luas lahan pertanian di Kota Delta saat ini mencapai 19.942 hektare, dengan sebagian besar lahan digunakan untuk tanaman padi dan palawija, yakni seluas 14.651 hektare.

"Kami menghadapi pengurangan lahan seluas 596 hektare akibat alih fungsi lahan dan peralihan komoditas, seperti tanaman tebu," ujarnya pada Senin (20/1).

Tahun lalu, produksi padi Sidoarjo tercatat mencapai 189.398,5 ton, yang menghasilkan surplus beras sebesar 12.978 ton. Namun, angka tersebut masih dianggap kurang. Untuk memenuhi kebutuhan beras total sebesar 230.914 ton, Sidoarjo masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat men-



PANGAN: Petani saat menyemprot tanaman padinya.

jadi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan," tambah Eni.

Ia juga menyoroti pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, yang

turut memicu ketergantungan pada impor beras dari daerah lain. "Kami terus ber-

upaya mengatasi masalah ini," katanya.

Sebagai bagian dari mendukung Program Cita Presiden Prabowo, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan benih dan subsidi kepada petani. Selain itu, distribusi pangan juga menjadi perhatian utama Dispaperta.

"Kami berupaya memperbaiki sistem distribusi pangan. Distribusi yang efisien adalah kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan terangnya.

Eni juga mengakui bahwa peralihan lahan dari tanaman padi ke tebu menjadi salah satu tantangan bagi Dispaperta. Namun, pihaknya optimistis bahwa kemandirian pangan di Sidoarjo dapat wujud dengan adanya kolaborasi antara semua pihak.

"Dengan sinergi yang baik, kami yakin Sidoarjo mampu menjaga ketahanan pangan untuk masa depan yang berkelanjutan," tutup (sai/vga)

PMK Naik Drastis, Ternak Mati hingga Dipotong Paksa

KOTA-Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak di Sidoarjo dengan jumlah kasus yang meningkat drastis pada Januari ini.

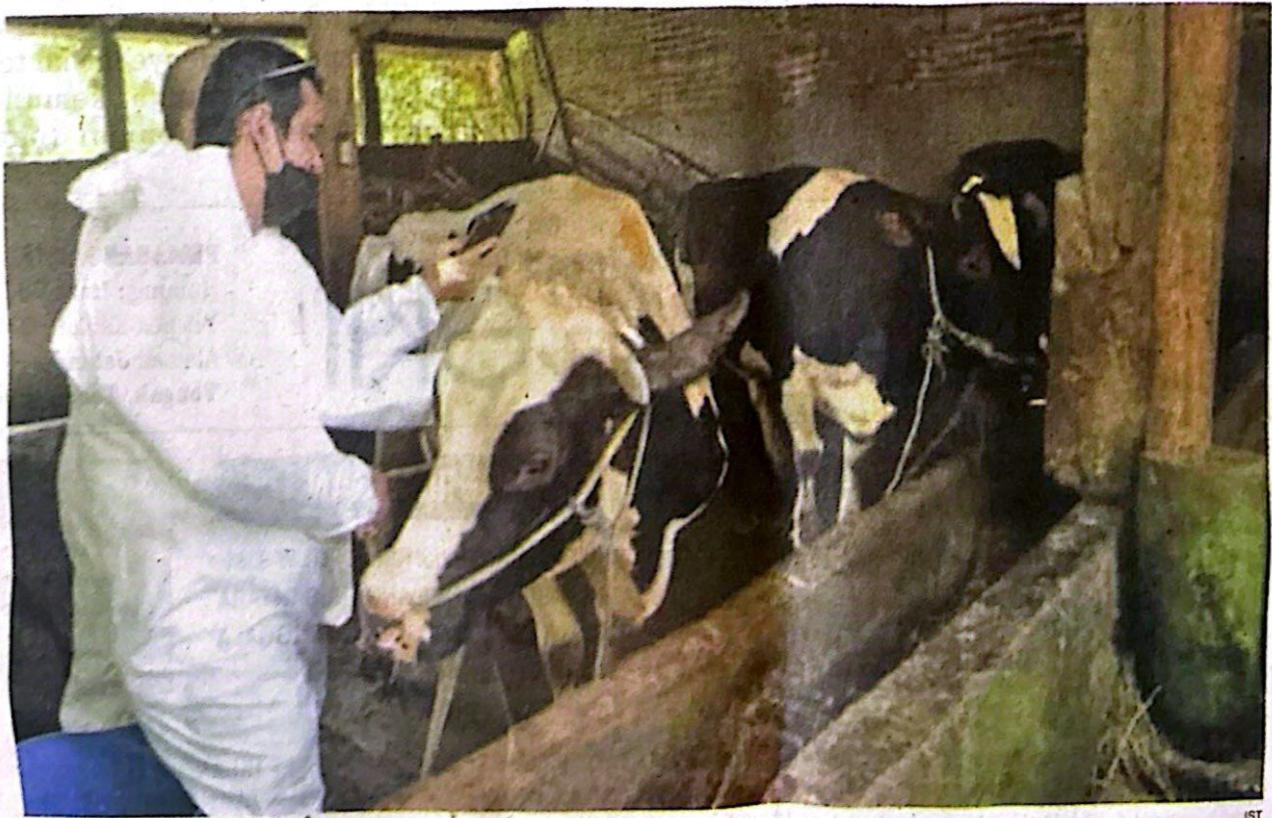
Hingga saat ini, tercatat 135 kasus PMK di hewan ternak di Kota Delta, dengan rincian 109 ekor ternak sakit, sembilan ekor mati, dan 17 ekor dipotong paksa.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaptera) Sidoarjo, drh Tony Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah kasus ini dipengaruhi oleh lalu lintas ternak dari luar daerah.

"Menjelang persiapan kurban, banyak ternak dari luar daerah yang masuk ke Sidoarjo tanpa pengawasan yang ketat," ujarnya, Senin (20/1).

Untuk menekan penyebaran penyakit, Pemkab Sidoarjo kini mewajibkan setiap ternak yang keluar maupun masuk ke daerah tersebut untuk memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Hewan yang terindikasi sakit dipastikan tidak diperbolehkan masuk ke Sidoarjo.

● Ke Halaman 10



KASUS NAIK: Petugas saat memvaksin ternak di Sidoarjo.

com f Radar Sidoarjo radarsidoarjo

CS Scanned with CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SOUTH METRO Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS | SELASA 21 JANUARI 2025 | HALAMAN 20

3.500 Dosis Disiapkan untuk Vaksinasi Massal

Putus Penularan Penyakit Mulut dan Kuku, Dilaksanakan Serentak Besok

SIDOARJO – Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Sidoarjo melonjak. Hingga saat ini ada 1,5 ternak yang terinfeksi penyakit tersebut. Besok (21/1) pemerintah akan melaksanakan vaksinasi massal serentak untuk memutus penularan.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo drh Tony Hartono mengatakan, Rabu (22/1) akan ada apel siaga nasional PMK di Sidoarjo. Kegiatan vaksinasi massal setelah Rabu, namun saat ini tim juga turun melayani permintaan vaksinasi," ujar



SUDAH DIVAKSIN: Aminur Rozaq memberi pakan tambahan untuk ternak sapiunya di Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo, kemarin (20/1).

Tony kemarin (20/1). Total sebanyak 3.500 dosis yang diberikan untuk vaksin penanganan PMK di Kota Delta. Setelah habis, dia menyebutkan akan ada penambahan vaksin lagi dari pemerintah pusat. Proyeksinya pada bulan depan. "Karena sudah ada instruksi dari pemerintah pusat tentang darurat kewaspadaan peningkatan PMK," katanya. Karena itu, vaksinasi digen-jot. Selain vaksin, pihaknya

akan memberikan vitamin bagi hewan sekaligus desinfektan yang bisa digunakan di kandang ternak. Pihaknya juga memperketat lalu lintas hewan yang keluar maupun masuk ke Sidoarjo. Pengirim harus mengurus surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Sementara itu, di tengah wabah PMK yang terus naik, permintaan terhadap daging sapi masih stabil. Kepala

Bidang Perdagangan Disperindag Sidoarjo Listyaningsih mengatakan, sampai saat ini peredaran dan stok daging sapi di pasaran masih normal. Daging juga aman karena PMK tidak menular ke manusia. "Tidak ada penurunan, penjualan masih normal," jelasnya kemarin. Harga juga masih stabil di kisaran Rp 110 ribu per kilogram di pasar-pasar besar di Sidoarjo. (uzi/fal)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

LAYANAN BARU: Samsat Payment Point mulai dibuka di kantor Kecamatan Gedangan kemarin (20/1).

Kantor Kecamatan Gedangan Layani Bayar Pajak Kendaraan

SIDOARJO – Pembayaran pajak kendaraan bermotor kini bisa dilakukan di kantor Kecamatan Gedangan. Tahun ini, Pemkab Sidoarjo membuka Samsat Payment Point di kantor tersebut.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo. Kemarin (20/1), layanan sistem opsen PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama

kendaraan bermotor) mulai di-*launching* dan disosialisasikan di kantor Kecamatan Gedangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati bersama Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kresna Bimasakti meresmikan secara langsung.

Fenny mengatakan, keberadaan Samsat Payment Point tersebut akan memudahkan masyarakat Sidoarjo dalam membayar PKB tahunan di kantor Kecamatan Gedangan. Menurut dia, opsen PKB dan BBNKB akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Sidoarjo. Potensi yang diperoleh dalam setahun bisa mencapai Rp 386 miliar.

Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut lantas dibagi 70 persen masuk ke kas provinsi dan 30 persen diserahkan kepada kabupaten/kota. Itu berlaku sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022 disahkan untuk menggantikan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah. (uzi/fai)

Jawa Pos

KILAS DELTA



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PERLUAS JANGKAUAN: Distribution Center (DC) Buduran yang akan bersebelahan dengan kantor cabang baru Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Percepat Respons, Perumda Delta Tirta Tambah Kantor Cabang

SIDOARJO – Perumda Delta Tirta Sidoarjo segera membuka satu kantor cabang baru, yakni cabang Sukodono. Lokasinya berada di area Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di sebelah Distribution Center (DC) Buduran.

Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Dwi Hary Soeryadi mengatakan, saat ini ada tujuh kantor cabang Perumda Delta Tirta. Padahal, kecamatan di Sidoarjo berjumlah 18. Tujuh kantor cabang tersebut meliputi kantor cabang Porong, Krian, Taman, Sidoarjo, Waru 1, Waru 2, dan Gedangan.

Dia mengatakan, penambahan kantor cabang tersebut untuk meningkatkan respons dan efektivitas dalam menangani pengaduan pelanggan.

Cabang Sukodono nanti akan melayani pelanggan di Kecamatan Sukodono, sebagian Sidoarjo.

sebagian Gedangan, dan sebagian Taman. Semoga layanan lebih baik dan cepat," ujar Dwi.

Cabang baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus memastikan penanganan pengaduan lebih optimal. (uzi/fal)

Jawa Pos

Akhir Tahun 2024 Tersisa 38 Ribu Keluarga Penerima Manfaat PKH di Sidoarjo



Warga miskin sedang antri menunggu sedekah.

alikusyanto/bhirawa

Sidoarjo, Bhirawa

Awal tahun 2025 masih ada sebanyak 38.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersisa dari tahun 2024 lalu.

Menurut Koordinator PKH Kabupaten Sidoarjo, M Ihksan, belum tahu pada tahun 2025 ini ada tambahan KPM lagi atau tidak di Kabupaten Sidoarjo. Dari PKH tahun 2024

lalu, yang lulus atau tidak menerima lagi PKH pada tahun 2025 ini sebanyak 3.100 KPM.

"Mereka yang dinyatakan tidak menerima PKH lagi tahun 2025 ini, faktornya bermacam-macam. Ada yang meninggal dunia, sudah lulus dari sekolah dan ada yang sudah bisa mandiri menjadi wirausaha," kata Ihksan.

Dikatakan Ihksan, PKH ini diberikan kepada KPM, dengan melihat sejumlah kondisi. Diantaranya diberikan apabila dalam keluarga miskin dan rentan miskin itu, ada Lansia, ada difabel, ada anak sekolah dan ada ibu hamil.

Sementara itu, Koordinator PKH wilayah Kecamatan Buduran, Mansyur, menambahkan, tahun 2024 lalu di Kecamatan Buduran ada 1.200 KPM yang menerima PKH. Dari KPM yang didampingi itu, sampai akhir tahun 2024, tercatat ada sebanyak 25 KPM yang lulus karena mandiri. Mereka bisa berdikari

menjadi wirausaha.

"Ada yang jualan Sembako juga ada yang beternak ikan lele," kata Mansyur.

Para KPM yang mandiri tersebut dari catatannya, banyak yang berasal dari wilayah Desa Sidokerto. Namun, dirinya tidak sampai menyebut berapa KPM dari Desa Sidokerto itu.

"Kalau para KPM ini bisa mandiri, kami juga ikut senang, jangan sampai seumur hidup menerima bantuan terus," katanya.

Pada tahun 2025 ini, Mansyur juga belum tahu, di wilayah Kecamatan Buduran apa masih mendapat tambahan lagi KPM dalam PKH ini.

Mensos Saifulah Yusuf, saat berada di Sidoarjo, sempat minta kepada setiap pendamping PKH supaya setiap tahunnya bisa mengurangi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Semoga di tahun 2025 nanti angka kemiskinan akan turun drastis bahkan sampai nol," kata Saifulah Yusuf saat itu. [kus.fen]



MERESAHKAN: Salah satu warga, Fadli menunjukkan lokasi kemunculan buaya di sungai Desa Kedungpeluk, Sidoarjo, Senin (20/1).

Tiga Buaya Muncul di Sungai Kedungpeluk, Jadi Tontonan Warga

CANDI-Tiga ekor buaya berukuran besar kembali muncul di Sungai Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Sidoarjo, dalam sepekan terakhir. Penampakan buaya ini diketahui oleh sejumlah warga di sekitar jembatan kayu, tepatnya di RT 5/RW 1 desa setempat.

Kemunculan hewan predator ini sering terlihat oleh para petambak, nelayan, maupun warga yang berada di sekitar

sungai Desa Kedungpeluk. Meskipun kemunculannya tidak dapat diprediksi, buaya-buaya tersebut paling sering muncul pada malam hari.

"Buaya tersebut kembali muncul seminggu yang lalu, sekitar pukul 22.00 malam di tengah sungai," kata Fadli, seorang warga setempat, pada Senin (20/1).

Fadli, yang berusia 25 tahun, mengaku menjadi

● Ke Halaman 10

PMK Naik Drastis,...

Meskipun ada pembatasan lalu lintas ternak, penyekatan di perbatasan belum dilaksanakan. "Saat ini, fokus utama kami adalah penerapan SKKH dan pengawasan ketat di daerah-daerah dengan kasus PMK tinggi," tambah Tony.

"Kami juga intensif melakukan pengawasan di daerah-daerah yang te-

lah tercatat kasus PMK," imbuhnya.

Salah satu langkah lain yang direncanakan adalah menutup pasar hewan. Namun, keputusan ini masih belum diambil karena kondisi pasar yang tidak terlalu ramai, kecuali pada hari-hari pasaran tertentu.

Terkait pengobatan, pihaknya terus melakukan isolasi dan perawatan terhadap ternak yang tertular. Pendataan

detail dengan sistem by name by address juga dilakukan untuk memantau kondisi ternak yang terinfeksi PMK.

Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, vaksinasi massal akan segera digelar di wilayah-wilayah yang rawan. "Sebanyak 3.500 dosis vaksin telah diterima dari pemerintah pusat untuk melindungi ternak yang masih sehat," jelas Tony. (sai/vga)

Tiga Buaya Muncul...

orang pertama yang menyaksikan penampakan langka ini. Ia melihat tiga buaya muncul sekaligus saat sedang duduk di pos depannya.

"Saya yang pertama kali melihat pada Senin (13/1), tiba-tiba kepala

buaya muncul di tengah sungai. Awalnya satu-satu, lalu jadi tiga buaya sekaligus," ungkap Fadli.

Fadli segera melaporkan penampakan tersebut kepada keluarganya, yang kemudian menyebar ke tetangga sekitar. Akibatnya, kemunculan buaya tersebut menjadi tontonan

warga setempat.

"Orang tua saya menggunakan senter dan terlihat jelas buayanya. Akhirnya, semua tetangga berbondong-bondong datang dengan membawa senter, meskipun tidak ada yang mengabadikan momen itu. Warga senang melihatnya," kata Fadli. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hari Jadi ke-166



Peringati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-166 Tahun 2025, 1000 anak yatim piatu doa bersama dan istighosah

Doa Bersama 1000 Anak Yatim Piatu

SIDOARJO - Peringati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-166 Tahun 2025, sekitar 1000 anak yatim piatu mengikuti doa

...doa bersama dan istig-
hosan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten
Sidoarjo, Fenny Apridawati dan Plt. Ketua Tim
Penggerak PKK (TP PKK) Sidoarjo, Sriatun
Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Minggu
hingga sore, (19/1/25).

Acara ini digelar dengan khidmat, diiringi
harapan dan doa untuk Kabupaten Sidoarjo.
Dalam istighosah tersebut, para peserta me-
manjatkan doa agar Sidoarjo menjadi kabu-
paten yang baldatun thayyibatun wa rabbun
ghafur, yaitu wilayah yang penuh keberkahan,
kesejahteraan, dan terhindar dari segala mara
bahaya.

Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Aprida-
wati menyampaikan rasa syukurnya atas usia
Kabupaten Sidoarjo yang telah mencapai 166
tahun dan juga menyampaikan apresiasinya
atas antusiasme anak-anak yatim piatu yang
mengikuti acara ini.

"Kami berdoa agar Kabupaten Sidoarjo
terus menjadi kabupaten yang makmur, se-
jahtera, dan dijauhkan dari segala bencana.
Semoga seluruh masyarakatnya hidup rukun
dan senantiasa mendapatkan perlindun-
gan dari Allah SWT. Melalui doa bersama
ini, kita semua berharap Sidoarjo menjadi
tempat yang lebih baik untuk generasi
mendatang,"ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fenny Apridawati
juga menyampaikan bahwa Pemerintah Ka-
bupaten Sidoarjo akan terus berkomitmen
dan peduli terhadap 1.175 anak yatim piatu
di Kabupaten Sidoarjo.

"Pemkab Sidoarjo akan terus membersa-
mai 1.175 anak yatim piatu muslim ataupun
non muslim untuk kelangsungan hidupnya.
Pada tahun ini. Pemkab Sidoarjo telah

bantu 1.175 anak yatim piatu dengan memberikan bantuan Rp. 450.000,' per bulan kepada setiap anak yatim piatu. Dan tahun ini, anggaran APBD telah disiapkan untuk kebutuhan anak yatim piatu sebesar Rp. 6.433.125.000,' (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)," Ucap Fenny Apridawati.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati dan Plt. Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Sidoarjo, Sriatun Subandi beserta jajaran Forkopimda Sidoarjo membagikan bantuan kepada anak yatim piatu yang dilakukan secara simbolis. Pada pengajian tersebut, doa bersama dipimpin oleh KH. Saqir Ridho dari LKSA Kabupaten Sidoarjo. ● **Loe**



Scanned with CamScanner

DUTA

Buka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan membuka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan.

Pembukaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari sosialisasi sistem Opsen (pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu) untuk PKB dan BBNKB yang mulai diterap-

bah PAD kita guna mendukung pembangunan," ujar Fenny.

Namun, Fenny menyebutkan bahwa peningkatan terbesar berasal dari Opsen PKB, sementara peningkatan dari Opsen BBNKB masih terbilang kecil. Oleh karena itu, Fenny mengimbau camat, kepala desa, dan kepala kelurahan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah mereka untuk mengalihkan kendaraan operasionalnya ke pelat nomor Sidoarjo (W).

Meskipun terjadi perubahan dalam cara pemungutan pajak, Fenny menegaskan bahwa

kan sejak 5 Januari 2025.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengubah sistem bagi hasil pajak menjadi sistem opsen. Dalam hal ini, Pemkab Sidoarjo mulai memungut langsung tambahan pajak kepada pemilik kendaraan.

Pada acara peluncuran *Samat Payment Point*, yang berlangsung Senin (20/1/25) di Kantor Kecamatan Gedangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengungkapkan bahwa penerapan *Opsen PKB* dan *Opsen BBNKB* diproyeksikan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo hingga Rp386 miliar per tahun, meningkat Rp82 miliar dibandingkan dengan sistem bagi hasil sebelumnya.

"Opsen PKB dan BBNKB adalah peluang untuk menam-

nilai pajak kendaraan bermotor yang dibayar masyarakat tidak mengalami kenaikan. Perubahan hanya terletak pada rincian pembayaran, di mana besaran pembayaran pada item *Opsen PKB* akan mengurangi pembayaran pada item PKB sebelumnya.

"Pajak kendaraan bermotor tidak naik. Berita yang kemarin viral bahwa *Opsen PKB* dan *BBNKB* menyebabkan kenaikan pajak itu tidak benar," tegasnya.

Hermadi Listiawan, seorang warga Sidoarjo, mengaku telah memeriksa langsung pembayaran pajak kendaraannya dan memastikan tidak ada perubahan signifikan. Bahkan, ia menyebutkan ada pengurangan sebesar 100 rupiah dibandingkan dengan pembayaran tahun lalu.

"Jumlah PKB yang saya bayar masih sama dengan tahun lalu, bahkan berkurang 100 rupiah," ungkap Hermadi. • Loe





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tantangan dari Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo

Editor: Fathur Roziq

20 Januari 2025 10:19



Oleh: Fathur Roziq*

Opini



Aa

AA

Plt Bupati Sidoarjo Subandi telah membangun optimisme baru bagi jurnalis. Saat Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024, terang-terangan meminta pers rajin mengkritik. Kritik yang disimpan bisa menjadi bencana di kemudian hari.

"Teman-teman jurnalis sahabat pemerintah. Saya ingin terbuka. Silakan kritik lewat berita. Kita bisa tahu kinerja pemerintah juga dari media," ungkap Plt Bupati Sidoarjo Subandi di Hotel Luminor Sidoarjo Rabu (29 Mei 2024).

Langsung yakin? Tentu tidak. Saya bukan orang yang mudah *nggumun*. Sudah terlalu banyak pejabat yang menyampaikan hal serupa kepada media pers. Di depan publik. Ujung-ujungnya, ketika dikritik keras, akhirnya baper (terbawa perasaan) juga. Banyak pembisik masuk dan mengadu domba. Kemudian, diam-diam, jurnalisnya dimusuhi. Dikucilkan.

Namun, perlahan-lahan, tapi pasti. Kata-kata Abah Subandi (sapaan akrabnya) itu terus mendekati kebenaran. Selama menjabat Plt Bupati Sidoarjo, Subandi selalu merespons cepat berita-berita tentang sorotan tajam terhadap kondisi Sidoarjo.



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025," ujar Gus Wawan, sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan.

Kedua, Pemkab Sidoarjo kalah di pengadilan. PT ISS KSO menang dan punya hak untuk menjalankan terus kerja sama dengan Dishub Sidoarjo. Jika pemerintah kalah, keputusan dalam APBD 2025 tentang target PAD dari parkir tidak perlu dilaksanakan.

Yang tidak boleh adalah Pemkab Sidoarjo menang di pengadilan, tetapi belum ada target apa pun dalam APBD. Dishub Sidoarjo tidak bisa bergerak karena belum siap alternatif apa-apa

"Akibatnya, potensi pendapatan akan lost (hilang) sangat tinggi" tegas Gus Wawan.

Baca Juga:

[Dishub Sidoarjo Ditarget Rp 25 Miliar, Sengketa Parkir vs PT ISS Belum Kelar](#)



Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga saat keluar dari Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (14 Januari 2025). Sidang gagal. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sebelumnya diberitakan, DPRD Sidoarjo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo menetapkan target berat. Di tengah sengketa pengelolaan parkir dengan PT ISS-KSO, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo ditarget harus meraup PAD Rp 25 miliar dari sektor parkir. Sudah didok dalam APBD 2025.

Sengketa antara PT Indonesia Sarana Servis-Kerja Sama Operasional (PT ISS-KSO) masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Mediasi empat kali berakhir tanpa hasil. Sidang pada Selasa (14 Januari 2025) lalu juga gagal. Pembacaan materi gugatan batal.

Dishub Sidoarjo hadir. PT ISS-KSO tidak hadir tanpa penjelasan. Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan akan memanggil PT ISS-KSO agar hadir pada sidang Selasa (21 Januari 2025).

"Sidang ditunda," kata Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga saat keluar dari Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (21 Januari 2025).

Saat pengesahan RAPBD menjadi APBD 2025 Sidoarjo November 2024 lalu, DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:

[Tantangan dari Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo](#)

Berbagai sektor digenjot. Salah satunya, pengelolaan parkir. DPRD Sidoarjo meminta Dishub Sidoarjo mencari sistem alternatif. Pengelolaan parkir diharapkan bisa maksimal pada 2025 ini.

Dekatkan Pelayanan Pembayaran PKB, Pemkab Sidoarjo Buka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan

Media Sorot Mata 20 Januari 2025



RADAR
SIDOARJO.ID

Untuk itu, ia segera melakukan antisipasi dengan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi dari masyarakat, apabila nanti ada surat rekomendasi dari dinas terkait untuk dilakukan pembongkaran.

Namun, menurut Yany hingga saat ini belum ada permintaan atau surat rekomendasi dari terkait yang meminta bantuan institusinya untuk melakukan pembongkaran terhadap berdirinya menara telekomunikasi tanpa izin di Desa Simpang tersebut.

“Belum, hingga kini belum ada (surat, red) permintaan pembongkaran dari institusi terkait,” ungkapnya.

Ia tidak mau gegabah dalam melakukan tindakan tegas sebelum adanya permintaan atau koordinasi dari dinas lain terkait berdirinya menara telekomunikasi yang pembangunannya sudah hampir selesai itu.

Sementara itu, Mochammad Bachruni Aryawan, Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo belum mau berkomentar saat dimintai keterangan oleh awak media terkait langkah selanjutnya terhadap pembangunan menara telekomunikasi tanpa izin di Desa Simpang. (mams)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ini Kata Ketua DPRD Sidoarjo Jika Pembelajaran Di Bulan Ramadhan 1446 H Diliburkan

20 Januari 2025 Redaksi - medialidikkrimsus-ri.net



Sidoarjo.Media Lidikkrimsus.ri.net-Terkait pemerintah pusat ada rencana (wacana) pembelajaran di satuan pendidikan di Bulan Suci Ramadhan 1446 H diliburkan satu bulan penuh. Jika hal itu diberlakukan. Ini kata Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdullah Nasih di rumah dinas. Senin sore (20/1/2025)

Nasih meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selaku leading sector untuk segera mengantisipasinya dengan menyiapkan beberapa hal salah satunya SOP (Standar Operasional Prosedur).

"Mumpung masih ada waktu bilamana mempunyai program (acuan) yang jelas kepada sekolah maupun anak didik. Satu bulan itu waktu tidak pendek bila tidak ada kesiapan, persiapan program yang jelas maka akan menjadikan anak-anak liar (kehilangan arah) pembelajarannya," ujar politikus PKB



Karena sekarang era otonomi pendidikan, bagaimana libur satu bulan supaya dimaknai, ditafsirkan secara bijak komperhensif dan perlu disosialisasikan ke sekolah-sekolah, guru dan wali murid.

"Harapan kami sebenarnya bukan libur tetapi sekolah formal yang libur tetapi dari program-programnya misalnya Pondok Romadhon, siraman rohani. Yang penting anak-anak memiliki keinginan dan rasa bersekolah. Begitu juga gurunya tidak serta merta libur satu bulan tetapi memiliki tugas-tugas pembelajaran," harapnya.

Untuk itu, Abdullah Nasih akan memerintahkan Komisi D berkordinasi dengan Dikbud Sidoarjo, stakeholder terkait dan pemerhati pendidikan.

"Jangan sampai kebijakan libur satu bulan ini justru kontraproduktif dengan proses penyiapan kepada anak-anak kita. Dari sisi keilmuan dan adat ataupun akhlak. Yang penting bagaimana, Romadhon itu harus menjadi epicentrum dalam sebuah proses pembentukan karakter, keimanan, ketakwaan, adat kepada anak-anak kita" tegas politikus senior.

Ia meminta Komisi D sebagai fungsi kontrol, pengawasan untuk terus memantau dan sesekali melakukan sidak untuk memastikan sekolah tersebut melaksanakan program dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan anak didik. (Znr/yun)

